



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.603, 2019

LKPP. Hasil Evaluasi Jabatan. Perubahan.

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL
EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil validasi evaluasi jabatan berupa nilai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, perlu menetapkan kelas jabatan untuk jabatan fungsional Analis Kebijakan Pertama dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Menimbang : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Mengubah Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN
 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	FAKTOR 1 Penghasilan (Level 1~9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)	FAKTOR 5 R. Lingkup & Pengaruh (Level 1~5)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1~5)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)	FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
1	PENGENGEMUDI (SMA)	3	370	2	200	1	25	1	25	1	20	2	20
2	ARSIPARIS PELAKSANA (D3)	6	755	4	550	1	25	1	25	2	25	1	5
3	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN (D3)	7	855	4	550	2	125	1	25	2	25	1	5
4	PENGADMINISTRASI UMUM (D3)	6	755	4	550	1	25	1	25	2	25	1	5

Paraf I	Paraf II	Paraf III

5	PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN (D3)	6	755	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	PENGADMINISTRASI SERTIFIKASI (D3)	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
7	PENGELOLA (D3)	6	755	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5
8	PENGOLAH DATA (D3)	6	755	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5
9	VERIFIKATOR KEUANGAN (D3)	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	PENYUSUN BAHAN (S1)	7	1035	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
11	PENYUSUN LAPORAN BMN (S1)	7	1035	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
12	PENATA KEUANGAN (S1)	7	1035	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
13	PERENCANA PERTAMA (S1)	8	1110	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
14	PERENCANA MUDA (S1)	9	1460	5	750	3	275	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
15	PERANCANG PERATURAN PER-UU PERTAMA (S1)	8	1145	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
16	PERANCANG PERATURAN PER-UU MUDA(S1)	9	1495	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
17	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA (S1)	8	1110	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
18	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA (S1/S2)	9	1460	5	750	2	275	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
19	PRANATA HUMAS PERTAMA (S1)	8	1145	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
20	PUSTAKAWAN PERTAMA (S1)	8	1145	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5

Paraf I	Paraf II	Paraf III

21	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA (D3)	6	790	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
22	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN (D3)	7	890	4	550	2	125	1	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
23	PRANATA KOMPUTER PENYELIA (D3)	8	1205	5	750	2	125	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
24	PRANATA KOMPUTER PERTAMA (S1)	8	1195	5	750	2	125	1	125	1	25	3	150	2	75	1	10	2	50	1	5	1	5
25	PRANATA KOMPUTER MUDA (S1/S2)	9	1460	5	750	3	275	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
26	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA (S1)	8	1280	5	750	2	125	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
27	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA (S1)	8	1105	5	750	2	125	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

RONI DWI SUSANTO

Paraf I	Paraf II	Paraf III